**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**(**Studi Kasus pada Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Timur Tahun 2013-2016)

Oleh:

EVA WAHYU MAHANANI

15081237

Prodi Akuntansi

Fakultas Ekonomi

Universitas Mercu Buana Yogyakarta

**ABSTRACT**

This study aims to analyze the effect of fiscal decentralization on economic growth and regional income in East Java Province for the four years 2013-2016. The dependent variable in this study is economic growth and local revenue while the independent variable in this study is fiscal decentralization. This study uses simple linear regression.

The results of the analysis concluded that fiscal decentralization had a significant positive effect on economic growth in East Java Province. Meanwhile, fiscal decentralization has no significant effect on local revenue in East Java Province. In four years empirically in East Java Province, the region's original income always rose every year. Then for economic growth in East Java Province experienced an increase and decrease in economic growth.

**Keywords: Fiscal Decentralization, Economic Growth, and Regional Original Revenue**

1. **PENDAHULUAN**

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Sutrisno (1984:200) pendapatan asli daerah adalah suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah. Jadi pengertian pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber-sumber keuangan untuk membiayai tugas-tugas dan tanggungjawabnya. Menurut pasal 6 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah berasal dari : a.) Hasil pajak daerah b.) Hasil retribusi daerah c.) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan d.) Dari dinas dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Untuk membiayai pembangunan daerah, salah satu modal yang digunakan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD yang merupakan salah satu sumber penerimaan daerah memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Menurut pernyataan standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 mendefinisikan Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Sutrisno (1984:200) pendapatan asli daerah adalah suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah. Jadi pengertian pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber-sumber keuangan untuk membiayai tugas-tugas dan tanggungjawabnya. Menurut pasal 6 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah berasal dari : a.) Hasil pajak daerah b.) Hasil retribusi daerah c.) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan d.) Dari dinas dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Untuk membiayai pembangunan daerah, salah satu modal yang digunakan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD yang merupakan salah satu sumber penerimaan daerah memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Menurut pernyataan standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 mendefinisika Pendapatan daerah adalah arus masuk dari pemanfaatan ekonomi yang timbul dari aktivitas normal selama suatu periode. Sedangkan, Pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Desentralisasi fiskal adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Menurut World Bank (1997b), desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung ada tiga mekanisme dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Agrumentasi pertama mengatakan bahwa desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi ekonomi di sektor pengeluaran pemerintah, jadi efek dinamis ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, ada hubungan positif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Argumentasi kedua, bahwa desentralisasi akan menyebabkan instabilitas makroekonomi sehingga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian terdapat hubungan negatif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Dan argumentasi ketiga, mengatakan bahwa dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi akan berbeda dengan negara maju dan berkembang. Bagi negara berkembang keuntungan-keuntungan dari desentralisasi ini tidak begitu didasarkan. Pendapat ini didasari karena kelembagaan di negara berkembang tidak memberikan intesif kepada pemerintah daerah untuk menggunakan informasi berkaitan dengan konstituennya. Pemimpin mungkin ditunjuk berdasarkan kekuasaannya. Alasan lain adalah bahwa pemerintah daerah di negara berkembang mungkin tidak memiliki sumber daya ekonomi yang cukup dan lemahnya skill sumber daya manusia dalam mengelola anggaran.

Word Bank (1997a), Martinez dan McNab (2001), kemudian juga mengingatkan bahwa desentralisasi fiskal dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi fiskal dapat mendorong ke arah ketidakstabilan ekonomi makro, yang pada gilirannya akan menghambat pertumbuhan ekonomi, sebab desentralisasi fiskal dapat mengurangi pengeluaran pemerintah dan pajak yang berbasis pada pemerintah pusat yang dapat digunakan untuk melakukan fungsi stabilitas.

Di Indonesia, peneliti yang menjelaskan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat diantaranya Hirawan (2007) menyatakan bahwa Indonesia mengalami perbaikan cukup signifikan dalam berbagi aspek era otonomi daerah. Di bidang pendidikan, misalnya, dorongan pemerintah pusat untuk membangun sekolah-sekolah di setiap daerah yang telah meningkatkan tingkat pendaftaran *(ernroll rate)* cukup tinggi. Bebagai indikator di bidang kesehatan masyarakat juga menunjukkan adanya perbaikan/peningkatan selama beberapa tahun terakhir; belanja publik secara rill untuk kesehatan dari tahun 2001-2006 naik hampir 100%. Juga Simanjuntak (2010) menegaskan bahwa potret perekonomian nasional dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun memang sejalan dengan peningkatan sumber-sumber pendanaan daerah, karena desentralisasi fiskal.

Dalam kaitannya dengan manajemen makro ekonomi menurut simanjuntak (2010), isu-isu kunci yang menonjol adalah pengaruh desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan, inflasi, serta pelayanan publik. Sebagai ekonom percaya bahwa desentralisasi fiskal mendorong pertumbuhan, memperbaiki pemerataan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Sebagian lain meyakini bahwa desentralisasi mungkin dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi, meski prosesnya cenderung menyulitkan majanemen makroekonomi, memperlambat pertumbuhan, meningkatkan ketidakmerataan dan ketimpangan, serta memperburuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan bersifat ambiguitas itu tidak lepas dari ciri desentralisasi fiskal yang multidemensi.

Desentralisasi mempengaruhi pendapatan asli daerah karena desentralisasi fiskal sebagai penyerahan tanggung jawab belanja, penyerahan penelola sumber pendapatan dan pinjaman atau hibah daerah. Pengelolaan sumber pendapatan yang harus diterima oleh pemerintah daerah. Pengelola pendapatan seperti pajak daerah, retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah dan pendapatan lain-lain yang sah yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat diserahkan wewenangnya kepada daerah. Dimana dalam konteks desentralisasi fiskal adalah untuk memberikan keleluasaan pada pemerintah daerah pada program sosial yang tepat pada konstituenya *United Nation Development Programe* (1990).

Pelaksanaan desentralisasi diwujudkan dengan pemberian otonomi. Dengan adanya otonomi daerah memberikan tantangan kepada daerah untuk mandiri secara fiskal. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki daerahnya, baik menyangkut sumber daya manusia, dana maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah dan mengembangkan sistem serta tata kelola daerah yang mencangkup structural maupun infrastuktur sehingga daerah-daerah otonom mampu menghasilkan pendapatan guna merealisasikan pemerataan pembangunan daerah secara lebih nyata dan mandiri. Hal ini yang mendorong suatu daerah untuk mengalokasikan pendapatan daerahnya secara lebih efisien sebagai potensi local untuk kepentingan pelayanan publik (Mardiasmo, 2009:139)

Beberapa studi menyoroti pengalaman negara-negara tertentu dalam mengimplementasikan desentralisasi fiskal mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Bird dan Vaillancourt, 2000). Namun, harus diakui juga bahwa dasar teoritis yang menjelaskan kedua hubungan tersebut saat ini sedang dikembangkan dan banyak menjadi perdebatan di antara para ahli dalam berbagai literature teoritik dan empirik. Penelitian Oates (1993), Martinez dan McNab (2001) menghasilkan, desentralisasi fiskal dapat mendorong efisiensi ekonomi dan secara dinamis akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Mereka berargumen bahwa pengeluaran untuk infrastuktur dan sektor sosial akan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena daerah mengetahui karakteristik daerahnya masing-masing. Jadi menurut pandangan ini pemerintah daerah mengalokasikan dana kepada sektor ekonomi secara efisien daripada dilakukan pemerintah pusat. Tetapi, tidak akan terjadi jika desentralisasi fiskal tidak berjalan secara efektif (Martinez dan McNab, 2001).

Bambang dan Mahmudi (2012), tujuan akhir dari kebijakan dan kegiatan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi, yang berarti implentasi kebijakan dan perluasan kegiatan ekonomi adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru. Menurut Boediono (2009:29), stabilitas ekonomi adalah satu-satunya cara untuk melindungi agar penghasilan masyarakat yang kita upayakan meningkat tidak digerogoti oleh kenaikan harga. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi bersama-sama adalah kunci peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pajak daerah, tenaga kerja, jumlah penduduk, dll. Menurut Todaro, 2000 (dalam Pujiati, 2008) terdapat tiga faktor komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, ketiganya adalah: Akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia, pertumbuhan penduduk beberapa tahun selanjutnya yang akan memperbanyak jumlah akumulasi kapital dan kemajuan teknologi.

Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat kemudian juga didukung di hipotesis *“trickle down effect”* (dampak merembes kebawah) yang melekat pada *“growth paradigm”* yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menetes kesejahteraan masyarakat (pembangunan manusia) (lihat Kuncoro, 2004 : 116). Bhalla (1994) membawa perpektif lain yang menghubukan antara demokrasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat (pembangunan manusia). Ia menemukan pengaruh positif demokasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurutnya sebuah rezim demokratik cenderung lebih melindungi property dan hak kontrak yang sangat penting untuk berjalannya ekonomi pasar yang didorong oleh sektor swasta.

Menurut Kuncoro (2004: 117) walaupun Bhalla tidak secara langsung meneliti hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (pembangunan manusia) dengan membalik sebab akibat, penemuannya mengimplikasikan hipotesis *“trickle down effect”* terhadap kesejahteraan masyarakat. Perhatiannya adalah pada daya tahan demokrasi. Ketika demokrasi berjalan dengan baik, pertumbuhan ekonomi akan berjalan dengan cepat dan akan menetes pada kesejahteraan masyarakat (pembangunan manusia).

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang karena merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan dan hasilnya akan dapat dinikmati masyarakat sampai di lapisan paling bawah (Ratna dan Sriwardani 2017). Menurut Sanjaya (2012), pembangunan merupakan suatu perubahan dari keterbelakangan menjadi kondisi yang lebih maju sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Pembangunan pada dasarnya merupakan proses multidimensial yang mencakup berbagai perubahan struktur sosial, pertumbuhan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan (institusi) nasional (Todaro, 2000). Pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan.

Bagi negara berkembang termasuk Indonesia, pesatnya aliran modal merupakan kesempatan yang bagus guna memperoleh pembiayaan pembangunan ekonomi di mana pembangunan ekonomi yang sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia merupakan suatu usaha yang berkelanjutan yang diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD1945, sehingga untuk dapat mencapai tujuan itu maka pembangunan nasional dipusatkan pada pertumbuhan ekonomi (Ratna dan Sriwardani 2017). Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan “output perkapita”. Dalam pengertian ini ada dua sisi yang perlu diperhatikannya inoutput total dan jumlah penduduk, sebab hanya apabila keuda aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan output perkapita bisa dijelaskan. Kemudian aspek yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi perspektif waktu jangka panjang, yaitu apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapita menunjukkan kecenderungan yang jelas untuk menaik (Boediono, 2009).

Menurut data dari (wikipedia), Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apakah desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?
2. Apakah desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah?

**C. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

1. Landasan Teori

a. Desentralisasi

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah, oleh pemerintah pusat kepada otonom daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi makan muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia Adiepatto (2014).

b. Fiskal

Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau pembelanjaannya dengan maksud unetuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi (Sadono Sukirno, 2003). Kebijakan memiliki dua prioritas, yang pertama adalah mengatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan masalah-masalah APBN lainnya. Defisit APBN terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil dari pengeluarannya. Dan yang kedua adalah mengatasi stabilitas ekonomi makro, yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, tingkal inflasi, kesempatan kerja dan neraca pembayaran. Sedangkan kebijakan fiskal terdiri dari perubahan pengeluaran pemerintah atau perpajakan dengan tujuan mempengaruhi besarnya susunan permintaan agregat.

c. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan fungsi-fungsi publik atau bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep desentralisasi fiskal dikenal juga dengan *money follow function* yang berarti bahwa pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan diikuti oleh pembagian wewenang dalam aspek penerimaan pendanaan (Zulyanto, 2010). Dalam berbagai literatur terkadang desentralisasi juga diartikan sebagai suatu konsep, suatu proses, suatu teori, suatu metodelogi dan suatu kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan ketidak adilan pembangunan sosio-ekonomi pada suatu wilayah atau negara (Banapon, 2017). Desentralisasi selain dipahami sabagai suatu kebijakan untuk mendistribusikan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, desentralisasi juga sebagai cara untuk memperpendek rentang kendali yang pada akhirnya memudahkan pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah, sesuai dengan karakteristik daerah, lebih menyentuh kebutuhan-kebutuhan masyarakat di daerah serta diyakini lebih efektif dan efisien dalam pengembangan dan peningkatan ekonomi suatu wilayah.

d. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat (Al-Latif, 2018).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara di samping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggara pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, sebagaimana dikatakan oleh Santoso (1995:20) bahwa proposal PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi “derajat kemandirian” keuangan pemerintah daerah.

e. Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan peningkatan produksi barang dan jasa serta peningkatan kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan ekonomi sering juga diartikan sebagai peningkatan produk domestik bruto (PDB) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk kepada perubahan yang bersifat kuantitatif dan dapat diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto atau pendapatan atau nilai akhir pasar dari barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (Sukirno, 2006). Sementara itu, Todaro (2000) mengatakan bahwa terdapat 3 (tiga) komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja, serta kemajuan teknologi.

1. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah penjelasan sementara yang harus diuji kebenarannya mengenai masalah yang sedang dipelajari, dimana suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih (Dwiyanti, 2010). Perumusah hipotesis dalam penelitian ini berdasarkan hubungan antara desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah.

1. Hubungan desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi

Menurut World Bank (1997b), desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung ada tiga mekanisme dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Agrumentasi pertama mengatakan bahwa desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi ekonomi di sektor pengeluaran pemerintah, jadi efek dinamis ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, ada hubungan positif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Argumentasi kedua, bahwa desentralisasi akan menyebabkan instabilitas makroekonomi sehingga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian terdapat hubungan negatif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Dan argumentasi ketiga, mengatakan bahwa dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi akan berbeda dengan negara maju dan berkembang. Bagi negara berkembang keuntungan-keuntungan dari desentralisasi ini tidak begitu didasarkan. Pendapat ini didasari karena kelembagaan di negara berkembang tidak memberikan intesif kepada pemerintah daerah untuk menggunakan informasi berkaitan dengan konstituennya. Pemimpin mungkin ditunjuk berdasarkan kekuasaannya. Alasan lain adalah bahwa pemerintah daerah di negara berkembang mungkin tidak memiliki sumber daya ekonomi yang cukup dan lemahnya skill sumber daya manusia dalam mengelola anggaran.

Word Bank (1997a), Martinez dan McNab (2001), kemudian juga mengingatkan bahwa desentralisasi fiskal dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi fiskal dapat mendorong ke arah ketidakstabilan ekonomi makro, yang pada gilirannya akan menghambat pertumbuhan ekonomi, sebab desentralisasi fiskal dapat mengurangi pengeluaran pemerintah dan pajak yang berbasis pada pemerintah pusat yang dapat digunakan untuk melakukan fungsi stabilitas. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H1 : Desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi**

1. Hubungan desentralisasi fiskal dengan pendapatan asli daerah

Desentralisasi mempengaruhi pendapatan asli daerah karena desentralisasi fiskal sebagai penyerahan tanggung jawab belanja, penyerahan penelola sumber pendapatan dan pinjaman atau hibah daerah. Pengelolaan sumber pendapatan yang harus diterima oleh pemerintah daerah. Pengelola pendapatan seperti pajak daerah, retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah dan pendapatan lain-lain yang sah yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat diserahkan wewenangnya kepada daerah. Dimana dalam konteks desentralisasi fiskal adalah untuk memberikan keleluasaan pada pemerintah daerah pada program sosial yang tepat pada konstituenya *United Nation Development Programe* (1990).

Desentralisasi fiskal merupakan suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan fungsi-fungsi publik atau bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep desentralisasi fiskal dikenal juga dengan *money follow function* yang berarti bahwa pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan diikuti oleh pembagian wewenang dalam aspek penerimaan pendanaan (Zulyanto, 2010). Dari uraian tersebut, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

**H2 : Desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah**

1. **METODE PENELITIAN**
2. Pengumpulan Data dan Pengambilan Sampel

Penelitian ini merupakan merupakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013:13) metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *positivisme,* digunakan untuk meneliti pada populasi atau sample tertentu, teknik pengambilan sample pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian ini dilakukan di Propinsi Jawa Timur. Penulis memilih kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur karena daerah tersebut memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah Propinsi Jawa Timur selama periode 2013-2016. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling*, yaitu pengambilan sample dari populasi didasarkan pada kemudahan peneliti dalam mengambil sampel. Penelitian ini mengacu pada penelitian Bambang dan Mahmudi (2012) tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, dimana data yang digunakan merupakan data yang diterbitkan oleh orang yang bukan pengolahnya atau data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, yang umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan ataupun yang tidak dipublikasikan.

2. Definisi Operasional Variabel

a. Variabel Dependen

Variabel dependen atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono: 2010). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam lingkup regional yang sering digunakan. Produk Domestik Regional Bruto juga merupakan penjumlahan dari seluruh nilai tambah bruto barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh aktivitas ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu tanpa memperhatikan status kepemilikan (Irawan dan Soeparmoko, 2002). Pendapatan asli daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah), pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan pusat dan belanja, juga berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah (Sutrisno 1984:200). Untuk mengukur pendapatan asli daerah menggunakan pengukuran yang digunakan adalah presentase perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan total pendapatan. (Yudi dkk,2014).

b. Variabel Independen

Variabel independen dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan variabel bebas, Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2010). Variabel independen dalam penelitian ini adalah desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal adalah penyerahan urusan pemerintah pusat pada pemerintah daerah otonom berdasarkan asas otonomi (UU No. 23 Tahun 2004). Desentralisasi fiskal merupakan suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan fungsi-fungsi publik atau bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep desentralisasi fiskal dikenal juga dengan *money follow function* yang berarti bahwa pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan diikuti oleh pembagian wewenang dalam aspek penerimaan pendanaan (Zulyanto, 2010). Pengukuran desentralisasi fiskal dalam penelitian (Bambang dan Mahmudi 2012) , dinotasikan sebagai berikut:

C:\Users\LENOVO\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9E79.tmp.pngC:\Users\LENOVO\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9E7A.tmp.png

Keterangan:

DF= Desentralisasi Fiskal

BHP= Bagi Hasil Pajak

BPDRP= Bukan Pajak Dengan Realisasi Total Pemerintah

RTPP= Realisasi Total Pengeluaran Pemerintah

1. **Hasil Penelitian dan Pembahasan**
2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Hasil uji statistik deskriptif variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah

Hasil Uji Statistik Deskriptif

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variabel | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Devation |
| Desentralisasi Fiskal | 32 | 804.00 | 3942.00 | 1636.7188 | 662.69247 |
| Pertumbuhan Ekonomi | 32 | 462.00 | 1237.00 | 642.5000 | 191.84991 |
| Pendapatan Asli Daerah | 32 | 2490.00 | 218424.00 | 43369.1875 | 42913.78316 |
| Valid N (listwise) | 32 |  |  |  |  |

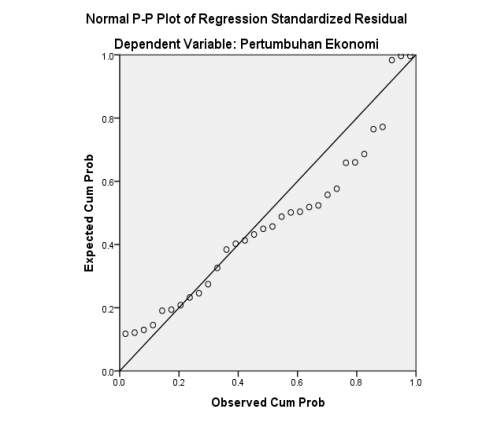
Sumber: data sekunder yang telah diolah

Berdasarkan uji statistik deskriptif pada tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 32 data sebagai sampel memiliki mean dari variabel Desentralisasi Fiskal sebesar 1636.7188 dengan standar deviasi 662.69247 variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 642.50000 dengan standar deviasi 191.84991 variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 43369.1875 dengan deviasi 42913.78316.

Hasil Uji Normalitas Data

Hasil Uji Normalitas Data Pertumbuhan Ekonomi

dengan grafik P-Plot

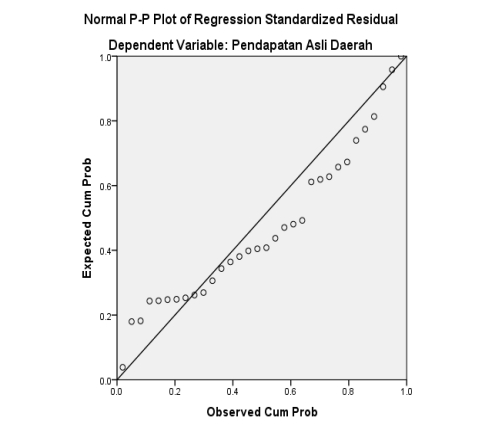


Sumber: data sekunder diolah penulis

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa titik-titik data menyebar disekitar garis diagonal dan titik-titik data searah mengikuti garis diagonal. Jadi dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal dan layak digunakan dalam penelitian.

Hasil Uji Normalitas data Pendapatan Asli Daerah

Dengan grafik P-plot

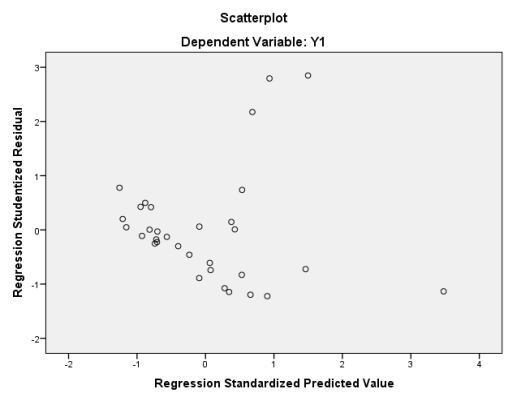


Sumber: data sekunder diolah penulis

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa titik-titik data menyebar disekitar garis diagonal dan titik-titik data searah mengikuti garis diagonal. Jadi dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal dan layak digunakan dalam penelitian. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semua data dari variabel pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terdistribusi normal.

1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

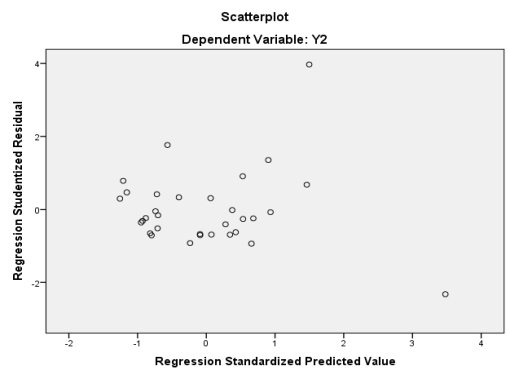
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: data sekunder diolah penulis

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik data tersebar secara acak diatas dan dibawah titik nol. Hal ini memiliki arti bahwa data tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Sehingga data tersebut layak untuk diteliti lebih lanjut.

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: data sekunder diolah penulis

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik data tersebar secara acak diatas dan dibawah titik nol. Hal ini memiliki arti bahwa data tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Sehingga data tersebut layak untuk diteliti lebih lanjut.

1. Hasil Uji Regresi Sederhana

Hasil Uji Regresi Sederhana

Desentralisasi fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | | | |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 469.840 | 86.723 |  | .000 |
| X | .105 | .049 | .364 | .040 |
| 1. Dependen Variable: Pertumbuhan Ekonomi | | | | | |

Sumber: data sekunder diolah penulis

Secara matematis hasil analisis linier sederhana tersebut dapat ditulis sebagai berikut:

X=469,840+0,105Y1+ɛ

Berdasarkan persamaan diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien sebesar 469,840 berarti setiap kenaikan 1% desentralisasi fiskal maka akan menyebabkan kenaikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar koefisienya Pada persamaan tersebut ditunjukan pengaruh variabel desentralisasi fiskal terdapat hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu persen dari rasio desentralisasi fiskal akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi tahun berjalan senilai koefisienya. Nilai koefisien regresi 469,840 (Y1) pada variabel desentralisasi fiskal tedapat hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap setiap kenaikan satu persen dari rasio desentralisasi fiskal akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi tahun berjalan sebesar nilai koefisiennya.

Hasil Uji Regresi Sederhana

Desentralisasi fiskal terhadap Pendapatan Asli Daerah

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | | | |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 15768.595 | 20112.047 |  | .439 |
| X | 16.863 | 11.415 | .260 | .150 |
| b. . Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah | | | | | |

Sumber: data sekunder diolah penulis

Secara matematis hasil analisis linier sederhana tersebut dapat ditulis sebagai berikut:

X=15768.595+16.863Y2+ɛ

Berdasarkan persamaan diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien sebesar 16,863 berarti setiap kenaikan 1% desentralisasi fiskal maka akan menyebabkan kenaikan terhadap pendapatan asli daerah sebesar koefisienya Pada persamaan tersebut ditunjukan pengaruh variabel desentralisasi fiskal terdapat hubungan positif dengan pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu persen dari rasio desentralisasi fiskal akan menyebabkan kenaikan pendapatan asli daerah tahun berjalan senilai koefisienya. Nilai koefisien regresi 15768.595 (Y2) pada variabel desentralisasi fiskal tedapat hubungan positif dengan pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap setiap kenaikan 1% dari rasio desentralisasi fiskal akan menyebabkan kenaikan pendapatan asli daerah tahun berjalan sebesar nilai koefisiennya.

1. Hasil Uji t

Hasil Uji t Variabel

Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | | | |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 469.840 | 86.723 |  | .000 |
| X | .105 | .049 | .364 | .040 |
| a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi | | | | | |

Sumber: data sekunder diolah penulis

Berdasarkan diatas hasil signifikan didapatkan nilai sebesar 0,040 nilai tersebut lebih kecil dari tingkat kritis sebesar 0,05. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Haditerima. Sehingga dapat dikatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil Uji t Variabel

Desentralisasi Fiskal Terhadap Pendapatan Asli Daerah

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | | | |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 15768.595 | 20112.047 |  | .439 |
| X | 16.863 | 11.415 | .260 | .150 |
| b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah | | | | | |

Sumber: data sekunder diolah penulis

Berdasarkan diatas hasil signifikan didapatkan nilai sebesar 0,150 nilai tersebut lebih besar nilai kritis 0,05. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Haditerima. Sehingga dapat dikatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

3. Pembahasan

a. Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil uji analisa regresi sederhana menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena dalam hal ini daerah dengan adanya desentralisasi fiskal mampu mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian Lintantia dan Miyasto 2013 bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Di Propinsi Jawa Timur khususnya di karesidenan adanya desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dalam era otonomi daerah memberikan dampak positif dalam mendorong pertumbuhan daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian ini dengan nilai koefisien 0,105 mempunyai dampak positif pada setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 1 persen. Dalam penelitian ini sesuai dengan tujuannya desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

1. Desentralisasi Fiskal terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil uji analisa regresi sederhana menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah karena dalam hal ini desentralisasi fiskal merupakan sebuah wewenang pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah untuk mengatur daerah masing-masing. Hal ini karena desentralisasi fiskal bukan merupakan salah satu sumber pendapatan yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. dalam hal ini Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan *United Nation Development Programe* (1990) bahwa desentralisasi mempengaruhi pendapatan asli daerah karena desentralisasi fiskal sebagai penyerahan tanggung jawab belanja, penyerahan pengelola sumber pendapatan dan pinjaman atau hibah daerah. Pengelolaan sumber pendapatan yang harus diterima oleh pemerintah daerah. Pengelola pendapatan seperti pajak daerah, retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah dan pendapatan lain-lain yang sah yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat diserahkan wewenangnya kepada daerah. Dimana dalam konteks desentralisasi fiskal adalah untuk memberikan keleluasaan pada pemerintah daerah pada program sosial yang tepat pada konstituenya. Di Propinsi Jawa Timur khususnya di karesidenan desentralisasi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian ini dengan nilai koefisiesn sebesar 16,863 mempunyai dampak positif pada setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 1%. Dalam penelitian ini sesuai dengan tujuannya desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

4. Penutup

a. Kesimpulan

Berdasarkan analisis menggunakan regresi sederhana dengan menggunakan SPSS versi 24 yang telah dilakukan untuk mengetahui bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah di Propinsi Jawa Timur khusus pada karesidenan periode tahun 2013-2016, maka dapat disimpulkan bahwa:

Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap terhadap pertumbuhan ekonomi.

Desentralisasi fiskal berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini, maka disampaikan beberapa saran yang diharapkan berguna, yaitu:

1. Pemerintah lebih menigkatkan pendapatan asli daerah dengan meningkatkan hasil pajak-pajak pada daerah tersebut. Hal ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan juga meningkatkan pendapatan asli daerah

2. Periode yang diginakan dalam penelitian ini masih terlalu singkat yaitu: hanya empat tahun periode untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur. Saran untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan tahun periode penelitian untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian.

3. Peneliti selanjutnya menambahkan variabel independen diluar variabel penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ali M, dan Maisyuri. 2017. Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara. Jurnal Akuntansi dan Pembangunan. Vol 3. No 1, Hal 41-55.

Akuarista Arum dan Gregorius N. Masdojo. Kajian Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah Periode 2008-2012. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin&Call For Papers Unisibank.

Aprizay Satrya Yudi, Darwanis dan Muhammad Arfan. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh

Bhalla, S. (1994). Freedom and Economic Growth: A Victous Circle. *Nobel Symposium Democracy Victory and Crisis.* Uppsala University.

Bahl, Roy W., 2000. *China Evaluating the Impact of Intergovernmental Fiscal Reform* dalam Fisikal Dezentralization in *Developing Countries.* Edited by Richard M. Bird an Francois Vaillancourt, Uninted Kingdom: Cambridge University Press.

Bird, R.M., & Vaillancourt, F. (2000). *Fiscal Decentralization in Developing Countries.* Terjemahan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Boediono (2009). *Ekonomi Indonesia Mau Dibawa Kemana? (Kumpulan Jurnal Esai Ekonomi).* Jakarta: KPG (Keperpustakaan Populer Gramedia) Bekerjasama Dengan Freedom Institute.

Brodjonegoro, P.S., dan Dartanto, Teguh. 2003. Dampak Desentralisasi Fiskal di Indonesia terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas antar Daerah: Analisa Model Marko Ekonometik Simultan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia.* Vol 4. No 1, 17-38.

Bhuwono Agung, Nugroho. 2005. *Strategi Jiti Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS.* Yogyakarta: ANDI.

Demora Viozana. 2016. Analisis Derajat Desentralisasi dan Kemandirian PAD serta hubungannya dengan produktivitas belanja daerah di Kota Jambi. E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 5 (1) Hal 13-20.

Djohan, Djohermansyah 1990, *Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal* (Cet. Pertama), Jakarta: Bumi Aksara

Dwiyanti, Rini. 2010. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.* Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Ghozali, Imam. 2009. *“Aplikasi Analisis Multivariabel dengan Program SPSS”.* Semarang : UNDIP.

Gurjarati, Damodar N., Dawn C. Poter. 2012. *Dasar-dasar Ekonomerika Edisi 5 Buku 1.* Jakarta Selatan: Salemba 47.

Hadi,Sutrisno. 1984. *Metodelogi Reseach III* (Yogyakarta : Andi Offset).

Harteti Y, Darwanis, dan Syukriy A. 2014. Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Jurnal Magister Akuntansi. Vol 3. No3, Hal 90-99.

Hirawan, S.B. (2007). *Desentralisasi Fiskal Publik (Bagi Orang Miskin) di Indonesia.* Pidato Pada Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Husein Umar. *Riset Strategi Pemasaran.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Imam Ghozali. *Apilkasi Analisis Multivariant dengan Program SPSS.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.

Irawan dan Suparmoko, M. 2002. *Ekonomika Pembangunan dan Perencanaan.* Ed 6. Jakarta: BPFE UGM

Irwansyah dan M. Soeparmo. 2002. Ekonomi Pembangunan Yogyakarta: BPFE

Kementrian Keuangan. 2010. *Grand Design Desentralisasi Fiskal* *di Indonesia.* Indonesia.

Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Jakarta:* Erlangga.

Mankiw, N. Gregory. 2007. *Makro Ekonomi edisi keenam.* Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik,* Yogyakarta: Andi.

Martinez, V.J.M., & McNab, R. (2001). Fiscal Decentralization, Ekonoic Growth, and Democratic Governance. *Working Paper*.

Nadir Sakinah, 2013. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Politik Profetik.* Vol:1 No 1

Oates, W.E. (1993). Fiskal Dezentralization and Economic Development. *National Tax Jurnal, 46 (3) Hal. 237-243.*

Pujiati, Amin. 2008. Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Hal 61-67.*

Saputra B, dan Mahmudi. 2012. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Akuntansi Internasional. Vol 16. No 2, Hal 185-199.

Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Simanjuntak, R.A. (2010). Desentralisasi Fiskal dan Manajemen Makroekonomi: Urgensi Suatu Grand Design di Indonesia.

Singgih Santoso. *Mastering SPSS Versi 19.* Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.

Sugiyono. *Statistika untuk Penelitian.* Bandung: Alfabeta, 2010.

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta. CV

Sukirno, Sardono. 2006. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga.* Jakarta: raja Grafindo Persada.

Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik,* Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Andi. Yogyakarta.

Supartoyo, Yesi H., Tatuh, Jen, dan Sendouw, Recky H.e. Juli 2013. The Economic Growth and The Regional Characteristics: The Case of Indonesia. *Jurnal Ekonomi Moneter dan Perbankan.* JEL Classification 047, C23, R11. Bank Indonesia.

Todaro, 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jilid, Edisi Keenam.* Jakarta: Erlangga

Uninted Nation Development Programme. 1990. *Human Development Report 1990.* UNDP. New York.

World Bank. (1997a). *The World Development Report.* New York: Oxford University Press.

World Bank. (1997b). *On Line Source Book On Desentralization And Rular Development.* Desentralization Thematic Team, SDA.

Zulyanto A. 2010. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu.Program Pascasarjana Universitas Diponegoro: Semarang.

<Http://adiepatto.blogspot.co.id/2014/11/teori-desentralisasi-dan-sentralisasi.html>

<Https://bpsjawatimur.go.id>

<Https://www.m.wikipedia.org>

<Http://www.malangkota.go.id>

<Http://www.djpk.go.id>